



# nawaja

Edisi 01, Vol. 09

Menegakkan Keadilan Pemilu: Menjaga Kemurnian Suara Rakyat

#### Jurnal Integritas:

- Toleransi terhadap gratifikasi sebagai proksi korupsi: Perbandingan antara Indonesia dan Hong Kong
- *State capture, grand corruption, petty corruption* dan hubungannya dengan investasi di Indonesia

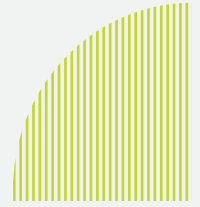
#### Koleksi Buku Bulan Ini:

- *Menjaga Asa Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*
- *E-Voting: Dalam Pemilu di Indonesia*
- *Hak Politik dan Hak Pilih: Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional*
- *Sistem Pemilu, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Tentang Sistem Pemilu dan Peran Partai Politik dalam Pencalonan dan Recall Anggota Parlemen*
- *Model Pemilihan Presiden dan Pemimpin Ideal*
- *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada*

**Perpustakaan Gedung Merah Putih KPK**  
Lt. 1, Jalan Kuningan Persada  
Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

**Perpustakaan Gedung Pusat Pelatihan Antikorupsi KPK**  
Lt. 4, Jalan Haji R. Rasuna Said  
Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

# Membangun Fondasi Keadilan dalam Pemilu



## Resensi buku "Menegakkan Keadilan Pemilu: Menjaga Kemurnian Suara Rakyat"

Pemilu merupakan pilar utama demokrasi di suatu negara, di mana keadilan menjadi kunci untuk menjamin suara rakyat terwakili dengan benar. Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Buku yang berjudul "Menegakkan Keadilan Pemilu: Menjaga Kemurnian Suara Rakyat" merupakan karya yang sangat relevan dan esensial, terutama dalam era demokrasi modern. Penulis secara teliti menyelidiki isu-isu krusial terkait dengan pemilu, menyoroti pentingnya menjaga kemurnian suara rakyat sebagai dasar utama demokrasi. Buku ini tidak hanya membahas teori-teori umum, melainkan juga memberikan solusi konkret dan langkah-langkah praktis untuk memastikan keadilan dalam proses pemilu. Fokus penulis pada peran lembaga pemilihan dan pengawasan masyarakat membantu pembaca memahami signifikansi kolaborasi antara pemerintah dan warga negara dalam menjaga integritas pemilu.

Selain itu, buku ini menyoroti peran teknologi modern dalam mengatasi tantangan pemilu, mengusulkan ide inovatif tentang bagaimana sistem elektronik dan aplikasi dapat digunakan untuk mencegah manipulasi suara. Gaya penulisan yang jelas dan argumentasi yang kuat membuat buku ini dapat diakses oleh berbagai kalangan pembaca, termasuk yang tidak memiliki latar belakang politik yang mendalam.



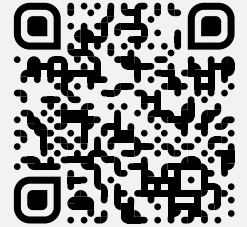
Ketidakaktualan Informasi menjadi kekurangan pada buku ini, karena pemilu dan hukum terkait dapat berubah seiring waktu. Jika buku tersebut tidak terus menerus diperbarui atau tidak mencakup perubahan terbaru, maka dapat menjadi kekurangan karena informasinya menjadi usang. Secara keseluruhan, buku ini menjadi panduan yang berharga bagi siapa pun yang ingin memahami kompleksitas dan urgensi pemilu dalam konteks demokrasi modern. Cari tahu selengkapnya mengenai buku ini di Perpustakaan KPK.

**Penulis** : Pan Mohamad Faiz  
**Penerbit** : PT. Raja Grafindo Persada  
**Tahun Terbit** : 2021  
**Tebal Buku** : 277

**Toleransi terhadap gratifikasi sebagai proksi korupsi:  
Perbandingan antara Indonesia dan Hong Kong**

***Tolerance to gratification as a proxy for corruption:  
Comparison between Indonesia and Hong Kong***

Alva Supit, Billy Lau, Patrick Cheng

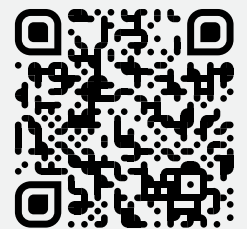


Korupsi merupakan masalah global yang dihadapi oleh setiap negara di seluruh dunia. Perilaku koruptif tidak berkembang dalam waktu yang singkat, dan oleh karena itu penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi yang lebih dini, proksimal dan kurang kelihatan. Dalam penelitian ini, dengan membandingkan indeks persepsi korupsi dan faktor sosiokultural antara Indonesia dan Hong Kong, dilakukan studi kualitatif tentang fenomena gratifikasi, yaitu suatu tindakan memberikan imbalan uang atau barang kepada petugas pelayanan publik untuk pelayanan yang mereka berikan, meskipun layanan tersebut sudah merupakan pekerjaan mereka. Subjek penelitian diambil dari mahasiswa atau lulusan baru (*fresh graduate*) dari Hong Kong dan Indonesia. Selama wawancara, ditemukan adanya perbedaan antara responden Hong Kong dan Indonesia dalam hal pengalaman dimintai imbalan, persepsi dan dorongan untuk memberi imbalan, serta kecenderungan untuk menerima imbalan saat melakukan transaksi pelayanan publik. Responden Indonesia umumnya lebih toleran, familier, dan permisif terhadap perilaku memberi/menerima imbalan dibandingkan responden Hong Kong. Alasan di balik fenomena ini kemudian diselidiki, dan korelasi antara permisivitas dengan indeks persepsi korupsi Indonesia dan Hong Kong diteliti. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa pemberantasan korupsi harus disertai dengan intervensi sosiokultural dan pendidikan dini terhadap subjek yang naif, untuk mencegah mereka terpapar budaya permisif terhadap gratifikasi, yang dapat bertindak sebagai prediktor perilaku korupsi di kemudian hari.

***State capture, grand corruption, petty corruption dan hubungannya  
dengan investasi di Indonesia***

***The correlation between state capture, grand corruption, petty  
corruption, and investment in Indonesia***

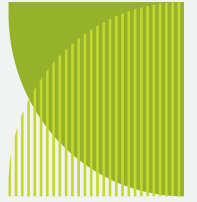
Emirzal Emirzal, Yohanna Magdalena Lidya Gultom, Vid Adrison, Roby Arya Brata



Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana hubungan antara berbagai jenis korupsi yaitu *state capture, grand corruption, dan petty corruption* dengan PMA dan PMDN di Indonesia. Menggunakan metode *ordinary least square*, penelitian ini menganalisis data putusan korupsi dari Mahkamah Agung yang terjadi pada 509 kabupaten/kota dengan tempus tahun 2015 s.d. 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dengan jenis *petty corruption* dan *grand corruption* berkorelasi positif dan signifikan dengan PMA, sedangkan untuk PMDN hanya *grand corruption* yang memiliki korelasi yang positif dan signifikan. Korelasi *grand corruption* dengan PMA terlihat lebih kuat apabila dibandingkan dengan *petty corruption*, sedangkan *state capture corruption* tidak berhubungan signifikan baik dengan PMA maupun PMDN. Hal ini menunjukkan pertumbuhan investasi di Indonesia diiringi dengan meningkatnya korupsi terutama korupsi dengan skala besar yaitu *grand corruption*.



# Koleksi Bulan Ini!



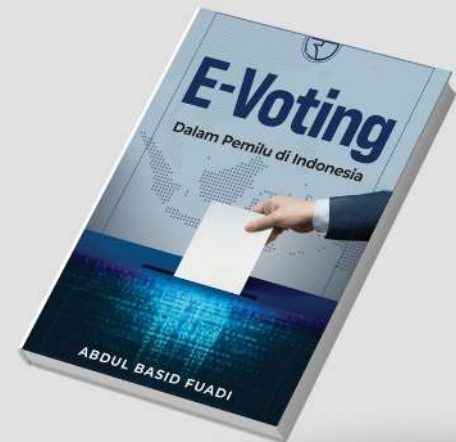
## Menjaga Asa Konstitusi dan Demokrasi Indonesia

Menguraikan tentang bagaimana perkembangan Mahkamah Konstitusi sejak awal berdiri yang telah banyak memutus berbagai perkara.



## E-Voting: Dalam Pemilu di Indonesia

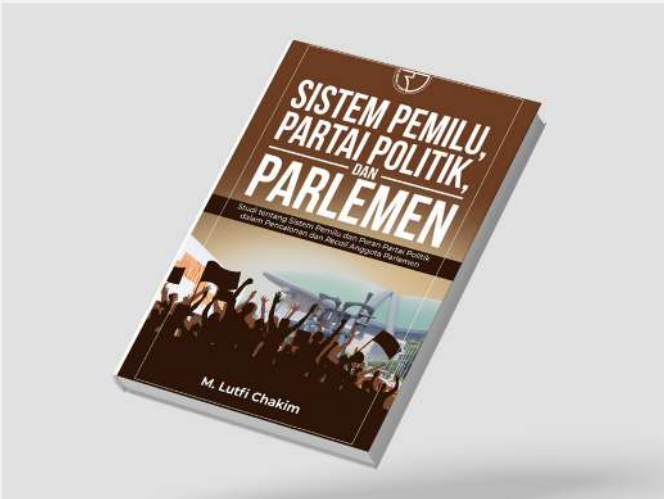
Penulis menjelaskan aspek hukum yang mengatur sistem elektronik dalam pemilu serta peluang dan tantangan penerapannya untuk menggantikan pemungutan suara dalam pemilihan umum secara konvensional.



## Hak Politik dan Hak Pilih: Perlindungan Melalui Peradilan Konstitusional

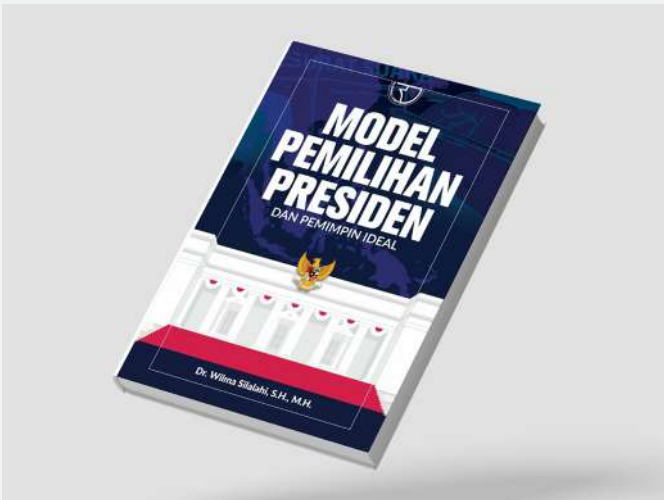
Menyampaikan implikasi dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hak politik dan hak pilih tersebut terhadap kemajuan pemikiran dan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia.





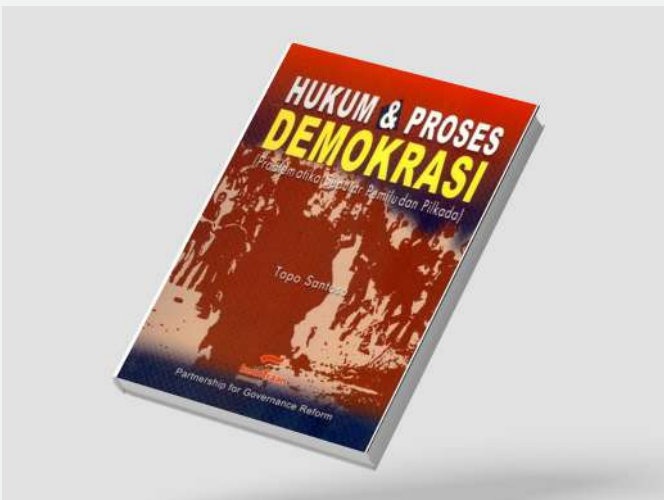
**Sistem Pemilu, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Tentang Sistem Pemilu dan Peran Partai Politik dalam Pencalonan dan Recall Anggota Parlemen**

Buku ini berisikan tentang kompleksitas persoalan petani meliputi ketersediaan lahan pertanian yang mengalami penurunan akibat masifnya konversi lahan.



**Model Pemilihan Presiden dan Pemimpin Ideal**

Menjelaskan perkembangan global konsepsi mendasar hak asasi manusia khususnya hak politik dan hak pilih, serta berbagai instrumen hukum internasional.



**Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada**

Rangkuman dari berbagai ulasan dan analisis terhadap berlangsungnya pemilu dan pilkada sepanjang 2004-2007. Menyoroti aspek hukum, baik aturan main maupun pelaksanaannya.



# nawaja

Edisi 01, Vol. 09

Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK  
Scan untuk informasi lebih lanjut

